

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP PENURUNAN
TINGKAT KEMISKINAN DENGAN PERAN PERKEMBANGAN UMKM SEBAGAI
INTERVENSI : PADA KABUPATEN INDRAMAYU- JAWA BARAT**

Tiara Fitri Rizkiyah¹, Azzatillah²

^{1,2}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Wiralodra

¹Tiarafitiriziyah17@gmail.com, ²Azzatillah09@gmail.com

ABSTRACT-Tingkat kemiskinan yang terus meningkat di Kabupaten Indramayu mencerminkan kompleksitas tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Indramayu, bisa menjadi pemicu meningkatnya tingkat kemiskinan secara signifikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, salah satunya melalui pengembangan dan peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Strategi ini diyakini sebagai cara efektif untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sampel penelitian mencakup data selama lima tahun, dari 2019 hingga 2023. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 3.2.9. Nilai *t-statistics* untuk hubungan antara perkembangan UMKM dan kemiskinan adalah 4,492, lebih besar dari 1,96, yang menunjukkan bahwa perkembangan UMKM secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara tidak langsung, nilai *t-statistics* sebesar 10,165, juga lebih besar dari 1,96, mengidentifikasi bahwa peran perkembangan UMKM memediasi pengaruh PDRB terhadap kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun penurunan PDRB dapat memperparah kemiskinan, pertumbuhan UMKM memainkan peran penting dalam mengurangi dampaknya, memberikan kesempatan untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat.

Keywords: *Produk Domestik Regional Bruto, UMKM, Kemiskinan*

PENDAHULUAN

Proporsi penduduk miskin di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Indramayu, masih tergolong tinggi. Hal ini menjadi persoalan utama yang dihadapi wilayah tersebut, mengingat tingkat perkembangan ekonominya yang masih tertinggal dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional. Kemiskinan yang terus meningkat di Kabupaten

Indramayu mencerminkan kompleksitas tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Meskipun daerah ini kaya akan sumber daya alam seperti pertanian dan perikanan, distribusi kekayaan yang tidak merata dan infrastruktur yang kurang memadai menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan yang dimiliki penduduk juga menjadi faktor penting dalam memperburuk kondisi kemiskinan. Solusi untuk mengatasi masalah ini memerlukan upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta mengembangkan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Indramayu, bisa menjadi pemicu meningkatnya tingkat kemiskinan secara signifikan. PDRB yang menurun mencerminkan berkurangnya aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya membatasi akses terhadap pekerjaan dan pendapatan yang layak. Dampaknya meluas ke berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, dan industri lokal (UMKM), yang sering kali merupakan tulang punggung ekonomi daerah ini. Kurangnya pertumbuhan ekonomi juga berpotensi mempengaruhi investasi

dalam pendidikan dan kesehatan, memperburuk ketimpangan sosial dan meningkatkan tingkat kemiskinan struktural. Upaya untuk memperbaiki PDRB perlu disertai dengan kebijakan yang mendukung penguatan sektor-sektor ekonomi lokal, pendidikan yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang lebih baik untuk meredam dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi, telah diupayakan melalui beberapa cara, salah satunya melalui pengembangan dan peningkatan Usaha Kecil, dan Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat kemiskinan, seberapa signifikan peningkatan peran UMKM dalam menurunkan tingkat kemiskinan, dan sejauh mana PDRB mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan dengan perkembangan UMKM sebagai intervensi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Diharapkan bahwa faktor-faktor seperti PDRB dan peran UMKM yang meningkat dapat terus berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Indramayu.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Sharp et al., (1996) dalam Kuncoro (2010), terdapat beberapa hal yang mengindikasikan kemiskinan. Pertama, kemiskinan terjadi karena adanya distribusi pendapatan yang tidak merata, yang disebabkan karena ketidaksetaraan dalam kepemilikan sumber daya, dimana penduduk yang miskin memiliki kuantitas yang sedikit dengan kualitas yang rendah. Kedua, kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan dalam

kualitas sumber daya manusia. Penduduk yang miskin umumnya memiliki kualitas SDM yang rendah sehingga tingkat produktivitasnya juga rendah, sehingga pendapatnya juga rendah. Pendapatan yang rendah ini menyebabkan tingkat pendidikan yang didapatkan juga rendah sehingga kemungkinan mendapat diskriminasi hingga kemiskinan berlanjut ke keturunannya. Ketiga, kemiskinan terjadi karena perbedaan jumlah modal yang bisa dipakai. Definisi kemiskinan telah berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas faktor penyebabnya, indikator, dan masalah lainnya.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi menjadi tema sentral bagi tiap negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat menyebabkan kebangkitan dan jatuhnya suatu pemerintahan mereka. Pada dasarnya, pembangunan merupakan suatu bentuk proses perubahan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, kompetitif, maju, dan sejahtera. PDRB merupakan salah satu parameter yang biasanya digunakan untuk mengukur nilai pertumbuhan suatu negara. Menurut Simatupang & Dermoredjo (2003), PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan peningkatan output nasional dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (2021), ada dua metode pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun PDRB Kabupaten/Kota, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung melibatkan penghitungan menggunakan data yang berasal dari masing-masing daerah. Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk pendekatan ini, yaitu

pendekatan dari total produksi daerah tersebut, total pendapatan, atau total pengeluaran. Sementara itu, metode tidak langsung dilakukan dengan mengalokasikan PDRB provinsi ke kabupaten/kota menggunakan indikator-indikator produksi dan yang sesuai.

Berdasarkan literatur yang ada, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki karakteristik unik dan penting bagi negara-negara berkembang, jika dibandingkan dengan perusahaan yang besar. Alasannya karena, pertama, dari segi kuantitas. Jumlah UMKM yang ada jauh lebih banyak dibandingkan jumlah perusahaan yang besar, khususnya di daerah pedesaan atau daerah di luar kota besar dengan sebaran pelaku usaha mikro dan kecilnya. Kedua, UMKM sangat padat karya sehingga memiliki potensi besar untuk meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan penghasilan. Ketiga, di negara berkembang, sebagian besar UMKM di pedesaan, berbasis pada sektor pertanian. Sehingga, mendukung UMKM khususnya usaha mikro yang fokus pada pertanian, secara tidak langsung juga meningkatkan pertumbuhan pada sektor pertanian. Keempat, banyak UMKM mampu bertahan bahkan tumbuh pesat saat terjadi krisis ekonomi, seperti krisis besar tahun 1997/1998 di Indonesia. Kelima, meskipun masyarakat pedesaan umumnya miskin, mereka masih mampu untuk menabung hingga mengambil risiko investasi, menjadikan UMKM sebagai titik awal mobilisasi tabungan dan investasi di pedesaan.

Menurut Tumbunan (2012), para pelaku usaha ini merupakan aset penting pada saat keadaan ekonomi suatu negara yang lamban dan saat sektor

industri tidak stabil, contohnya adalah saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1997/1998 di sebagian negara di Asia Tenggara, termasuk negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* untuk menyeleksi data penelitian. Sampel penelitian mencakup periode lima tahun, dari tahun 2019 hingga 2023. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 3.2.9 dengan metode *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM).

Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu pengujian model pengukuran dan pengujian model struktural: Pada tahap pertama, dilakukan pengujian terhadap model pengukuran yang meliputi uji validitas dan reliabilitas. Dua pendekatan digunakan untuk menguji validitas: *convergent validity* dan *discriminant validity*. *Convergent validity*, diuji dengan melihat nilai *loading factor* dan *Average Variance Extracted* (AVE). *Loading factor* dianggap valid jika lebih dari 0,7, sedangkan AVE dianggap valid jika lebih dari 0,5 (Hair et al., 2010). *Discriminant validity*, diuji dengan menggunakan *cross loading* dan kriteria Fornell-Larcker. *Cross loading* dianggap valid jika nilainya lebih dari 0,7 (Hair et al., 2010). Kriteria Fornell-Larcker terpenuhi jika varians pada blok indikatornya memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan konstruk yang lain (Garson, 2016). Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai *composite reliability* dan *Cronbach's alpha*. Nilai *composite reliability* dan *Cronbach's alpha*

dianggap reliabel jika lebih dari 0,7 (Hair et al., 2010).

Pada tahap kedua, dilakukan pengujian model struktural dan hipotesis penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *path coefficient*, *t-statistics*, dan *p-value*. *Path coefficient* bervariasi antara 0 dan 1, dengan nilai yang mendekati absolut 1 menunjukkan hubungan yang paling kuat (Garson, 2016). *t-statistics* dianggap signifikan jika lebih dari 1,96. *p-value* dianggap signifikan jika lebih kecil dari 0,05 (Sekaran & Bougie, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian ini, nilai *Loading Factor*, *Cross Loading*, dan *Average Variance Extracted* (AVE), digunakan sebagai indikator validitas model pengukuran. *Convergent Validity* diuji melalui *Loading Factor* dan *Average Variance Extracted* (AVE) dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Nilai Average Loading Factor

	Kemiskinan	PDRB	Perkembangan UMKM
PDRB		1,000	
Perkembangan UMKM			1,000
Kemiskinan	1,000		

Sumber: Data diolah, 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai *outer loading* untuk semua item atau indikator sudah >0,7. Oleh karena itu, berdasarkan validitas *outer loading*, semua item atau indikator dinyatakan valid dalam konteks validitas butir. Kriteria *convergent validity* lainnya yang harus dipenuhi adalah nilai AVE yang sama dengan atau lebih besar dari 0,5

(>0,5). Nilai AVE dalam penelitian ini ditampilkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Nilai Average Variance Extracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
PDRB	1,000
Perkembangan UMKM	1,000
Kemiskinan	1,000

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 3.2 semua konstruk pada seluruh variabel telah tercapai syarat validitas konvergen dikarenakan nilai AVE seluruh variabel >0,5. Hal ini berarti seluruh variabel penelitian ini valid secara konvergen.

Pada tahap selanjutnya, dilakukan pengujian validitas diskriminan untuk memastikan bahwa indikator penelitian mampu mengukur konstraknya sendiri dengan baik. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah indikator-indikator yang digunakan berkorelasi tinggi dengan konstraknya sendiri, dan tidak berkorelasi tinggi dengan konstruk yang lain. Penelitian ini menggunakan dua metode untuk pengujian validitas diskriminan: nilai *Cross Loading* dan Kriteria Fornell-Larcker.

Tabel 3.3.
Nilai Cross Loading

	Kemiskinan	PDRB	Perkembangan UMKM
PDRB	0,996	1,000	0,978
Perkembangan UMKM	0,987	0,978	1,000
Kemiskinan	1,000	0,996	0,987

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa nilai *Cross Loading* dari seluruh variabel di atas 0,7 yang berarti memenuhi standar diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua indikator pada validitas telah valid. Selanjutnya pengujian

validitas diskriminan menggunakan *Fornell-Larcker Criterion* yang ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Nilai *Fornell-Larcker Criterion*

	Kemiskinan	PDRB	Perkembangan UMKM
Kemiskinan	1,000		
PDRB	0,996	1,000	
Perkembangan UMKM	0,987	0,978	1,000

Sumber: Data diolah, 2024

Nilai *Fornell-Larcker Criterion* menunjukkan bahwa varians yang dijelaskan oleh konstruk yang diukur lebih besar daripada varians yang dijelaskan oleh variabel observasional lainnya dalam model yang sama. Ini menunjukkan bahwa konstruk yang diukur memiliki validitas diskriminan yang memadai dalam analisis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa discriminant *construct validity* dalam penelitian ini terpenuhi.

Pengujian reliabilitas model pengukuran dalam penelitian ini menggunakan indikator nilai *Composite Reliability* (CR) dan *Cronbach's Alpha*. Nilai CR yang diharapkan adalah sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (>0,7) untuk memastikan tercapainya konsistensi internal. Sedangkan nilai *Cronbach's Alpha* yang diharapkan adalah sama dengan atau lebih besar dari 0,6 (>0,6) untuk meyakinkan butir-butir pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian cukup andal. Nilai CR dan *Cronbach's Alpha* dalam penelitian ini, tersaji pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Kemiskinan	1,000	1,000
Pemberian Kredit	1,000	1,000
UMKM	1,000	1,000

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 3.5 menunjukkan nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* seluruh variabel di atas batas 0,7 sebagai syarat reliabilitas. Dengan demikian model pengukuran pada penelitian ini lulus uji reliabilitas.

Hasil Analisis Model Struktural dan Pengujian Hipotesis

Terdapat tiga indikator untuk menguji model struktural dan hipotesis: nilai path *coefficient* (β), *t-statistics* (*t*), dan *p-value* (*p*). Nilai *Path Coefficient* menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel. Nilai β bervariasi antara 0 dan 1. Nilai *t-statistics* digunakan untuk menguji signifikansi statistik hubungan antara variabel. Nilai *t* yang lebih besar dari 1,96 pada tingkat keyakinan 95% menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Nilai *p-value* digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Nilai *p* yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima. Berdasarkan pengujian hipotesis, berikut adalah hubungan pengaruh antar variabel dalam penelitian ini.

Tabel 3.6
Hasil Pengujian Model Struktural

Variabel	<i>T-Statistics</i> (<i>t</i>)	<i>P-Value</i> (<i>p</i>)
Perkembangan UMKM -> Kemiskinan	4,492	0,006
Perkembangan UMKM -> PDRB -> Kemiskinan	10,165	0,000

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 3.6 menunjukkan nilai *t-statistics* pada perkembangan UMKM dengan kemiskinan adalah sebesar 4,492 lebih besar dari 1,96 ($t=4,492>1,96$) dan *p-value* sebesar 0,006 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ ($p=0,781>0,05$) yang berarti secara langsung, perkembangan UMKM berpengaruh terhadap kemiskinan secara signifikan. Di sisi lain, secara tidak langsung, nilai *t-statistics* sebesar 10,165, yang lebih besar dari 1,96 ($t=10,696>1,96$) dan *p-value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha=0,05$ ($p=0,000<0,048$) mengidentifikasi bahwa Peran PDRB memediasi pengaruh Perkembangan UMKM terhadap kemiskinan.

Pembahasan

Perkembangan UMKM dengan Penurunan Tingkat Kemiskinan

Nilai *t-statistics* pada perkembangan UMKM dengan kemiskinan adalah sebesar 4,492 lebih besar dari 1,96 ($t=4,492>1,96$) dan *p-value* sebesar 0,006 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ ($p=0,781>0,05$) yang berarti secara langsung, perkembangan UMKM berpengaruh terhadap kemiskinan secara signifikan.

Peran dan pengembangan UMKM memiliki potensi yang signifikan, terutama dalam hal kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Pemerintah terus aktif dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Indramayu (Rizkiyah & Nidar, 2022). Berbagai program dan strategi telah diluncurkan untuk mendukung perkembangan UMKM, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, ada program bantuan langsung tunai khusus untuk pelaku UMKM dan program UMKM Naik Kelas.

Di balik berbagai program dan strategi yang digulirkan pemerintah pusat dan daerah untuk UMKM, terdapat tujuan mulia yaitu memajukan sektor UMKM. Pada gilirannya, kemajuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat dalam kegiatan UMKM. Pengembangan UMKM diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, memberikan dampak signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Indramayu.

Peran Perkembangan UMKM memediasi pengaruh PDRB terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Kemiskinan

Secara tidak langsung, nilai *t-statistics* sebesar 10,165, yang lebih besar dari 1,96 ($t=10,696>1,96$) dan *p-value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha=0,05$ ($p=0,000<0,048$) mengidentifikasi bahwa PDRB memediasi pengaruh perkembangan UMKM terhadap kemiskinan.

Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengelola PDRB secara efektif merupakan langkah krusial untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Indramayu. Hal ini membutuhkan upaya berkelanjutan dan terarah, dengan menjadikan PDRB sebagai prioritas utama dalam penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah harus fokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai strategi, dengan tujuan utama untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Upaya ini perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan dan mendistribusikan secara merata manfaat pertumbuhan dari sektor-sektor yang menjadi tempat bekerja penduduk miskin.

Distribusi hasil pertumbuhan PDRB yang adil dan merata menjadi kunci untuk mendorong pembangunan di berbagai sektor lapangan kerja dan berpotensi besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Indramayu (Rizkiyah, & Nurhayati, 2020). Pertumbuhan PDRB yang terkonsentrasi pada segelintir kelompok masyarakat berpeluang memicu ketimpangan dan memperparah kesenjangan ekonomi. Di sisi lain, rendahnya PDRB akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, memicu berbagai permasalahan sosial terkait kemiskinan, dan menghambat laju pembangunan di berbagai sektor (Rizkiyah, 2019). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan PDRB menyentuh semua golongan masyarakat, termasuk penduduk miskin.

UMKM sering kali menjadi tulang punggung ekonomi lokal dalam banyak daerah, termasuk di Kabupaten Indramayu. Ketika PDRB menurun, UMKM dapat mengalami penurunan produksi, penjualan, dan pendapatan. Hal ini berdampak langsung pada penghidupan banyak penduduk yang bergantung pada usaha kecil ini untuk mata pencaharian mereka. Kemunduran ini dapat membatasi kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat lokal, yang pada gilirannya memperburuk tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan dukungan untuk UMKM melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, akses lebih baik terhadap sumber daya dan pasar, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi UMKM di masa yang sulit.

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan, dan peran penting yang dimainkan oleh

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membantu memfasilitasi dampak tersebut. Dengan kata lain, UMKM tidak hanya mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi (PDRB), tetapi juga berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara memfasilitasi akses lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Bappenas, 2020).

KESIMPULAN

1. Perkembangan UMKM dengan Penurunan Tingkat Kemiskinan

Nilai *t-statistics* pada perkembangan UMKM dengan kemiskinan adalah sebesar 4,492 lebih besar dari 1,96 ($t=4,492>1,96$) dan *p-value* sebesar 0,006 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ ($p=0,781>0,05$) yang berarti secara langsung, perkembangan UMKM berpengaruh terhadap kemiskinan secara signifikan.

2. Peran PDRB memidiasi pengaruh Perkembangan UMKM terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan kemiskinan.

Secara tidak langsung, nilai *t-statistics* sebesar 10,165, yang lebih besar dari 1,96 ($t=10,696>1,96$) dan *p-value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha=0,05$ ($p=0,000<0,048$) mengidentifikasi bahwa PDRB memidiasi pengaruh perkembangan UMKM terhadap kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2021). Produk Domestik Regional Bruto. Jakarta: BPS RI.

- Bappenas. (2020). Sistem data dan penentuan sasaran (targeting) dalam penanggulangan kemiskinan. Jakarta: BPS RI.
- Garson, G. D. (2016). Partial least squares: regression and structural equation models. United State: Statistic Publishing Associates.
- Hair, Jr et.al. (2010). Multivariate data analysis (8th ed.). United States: Pearson.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Rizkiyah, T. F., & Nurhayati, N. (2020). Pengaruh Peningkatan Kredit BPR, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Gema Wiralodra, 11(2), 311-326.
- Rizkiyah, T.F & Nidar S.R. (2022). Apakah Peningkatan Kredit BPR dan Peran UMKM dapat Menurunkan Tingkat Kemiskinan?. *IMAGE: Jurnal Riset manajemen*, 11 (1), 1-13.
- Rizkiyah, T. F., & Nurhayati, N. (2020). Pengaruh Peningkatan Kredit Bpr, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan. Gema Wiralodra, 11(2), 311-326.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). research methods for business: a skill building approach (7th ed.). New Jersey: Wiley.
- Simatupang, P., & Dermoredjo, S. K. (2003). Produksi Domestik Bruto, harga dan kemiskinan: Hipotesis “trickle down” dikaji ulang. *Economics and Finance in Indonesia*, 51, 291-324.
- Tambunan, T. T. (2012). Peran usaha mikro dan kecil dalam pengentasan kemiskinan di daerah. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(2), 73-92.